

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

TESIS



Oleh :

MAIMUN

NPM. 011801006

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

2004

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

T E S I S

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
Pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik



Oleh :

MAIMUN
NPM. 011801006

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2004**

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :

Nama : MAIMUN
N I M : 021801006
PROGRAM : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
JUDUL : Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah
Kabupaten Aceh Timur

Pembimbing I,


Drs. Usman Tarigan, MS

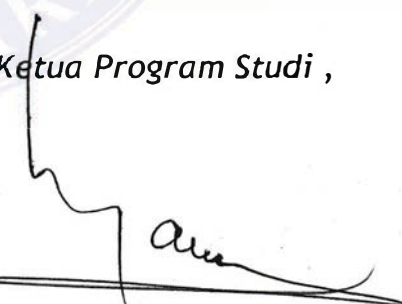
Pembimbing II,

Drs. Kariono, MA

Direktur,

Drs. Heri Kusmanto, MA

Ketua Program Studi ,


Drs. Usman Tarigan, MS

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis

**Program Pascasarjana
Magister Administraasi Publik
Universitas Medan Area**

Pada hari :
Tanggal : Nopember 2004
Tempat : Program Pascasarjana MAP-UMA

TIM PENGUJI

Ketua	: Drs. Heri Kusmanto, MA	(.....)
Sekretaris	: Taufik Siregar, SH, M. Hum	(.....)
Anggota I	: Drs. Usman Tarigan, MS	(.....)
Anggota II	: Drs. Kariono, MA	(.....)
Penguji Tamu	: Drs. Heri Kusmanto, MA	(.....)

A B S T R A K

Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

N a m a : Maimun
N I M : 011801006
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Drs. Usman Tarigan, MS
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Kabupaten Aceh Timur adalah salah satu Kabupaten yang ada pad Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 6.040,82 Km², jumlah penduduk 668.523 jiwa. Kabupaten Aceh Timur terdiri atas 19 Kecamatan, 513 Desa / Kelurahan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur, sehingga untuk memperlancarkan Pelaksanaan bangunan dan sekaligus meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat : dan sesuai dengan ketentuan Kepmendagri No. 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan yang sebelumnya merupakan Kecamatan pembantu dan Kecamatan Perwakilan, dipandang perlu untuk ditingkatkan menjadi Kecamatan-kecamatan baru di Kabupaten Aceh Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Sampel diambil secara *purposive sampling*, sebanyak 34 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif guna mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari ketiga indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan hasil yang diperoleh, menunjukan skor rata-rata dalam kategori sedang (2,08). Apabila dilihat dari masing-masing indikator, dari ketiga indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program (organisasi, interpretasi dan penerapan), hanya indikator organisasi yang termasuk dalam kategori baik, sedangkan untuk indikator interpretasi termasuk kategori sedang dan indikator penerapannya termasuk kategori kurang. Faktor utama yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur adalah faktor keamanan yang masih dalam situasi konflik, disamping faktor keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana / prasarana yang ada.

Kata-kata Kunci (Key words) : Implementasi Kebijakan, Pemekaran Kecamatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah "Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur". Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu segala saran dan kritik dari pembaca guna penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan.

Tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan tesis ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Zulkarnaen Lubis, MS, Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur PPs Magister Administrasi Publik, sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan demi terselesainya tesis ini.
3. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, Ketua Program Studi MAP sekaligus sebagai Pembimbing I, yang banyak memberikan dorongan kepada penulis.
4. Bapak Drs. Kariono, MA, Pembantu Direktur I Bidang Akademik, sekaligus sebagai Pembimbing II, yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan pada penulis

5. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

Terimakasih pula kepada kedua orang tua, istri, anak-anak dan seluruh keluarga, yang tidak pernah putus mengalirkan do'a dan memompakan semangat demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kiranya tetap mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wata'ala, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Oktober 2004

Penulis

Maimun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran	6
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik	7
2.2. Implementasi Kebijakan	10
2.3. Model Implementasi kebijakan	16
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Bentuk Penelitian	22
3.2. Populasi Sasaran	22
3.3. Rencana Sample	22
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5. Operasionalisasi Variabel	24
3.6. Teknik Analisis Data	26

BAB IV : GAMBARAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

4.1. Geografis	28
4.2. Demografis	30
4.3. Pemerintahan Kecamatan.....	33

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

5.1. Penyajian Data	34
5.1.1. Karakteristik Responden	34
5.1.2. Data Variabel Penelitian.....	38
5.2. Analisa Data	51

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	55
6.2. Saran - Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	57
----------------------	----

L A M P I R A N	
-----------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tonggak baru dalam hubungan Pusat dan Daerah. Disebut demikian karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya. Apabila Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menggunakan filosofi "keseragaman dalam kesatuan", maka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggunakan filosofi keanekaragaman dalam kesatuan" (Wasistiono, 2002 : 26).

Sebagai konsekuensi logis dari perubahan filosofi di atas, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Daerah, termasuk dalam pengaturan kelembagaan. Pola otonomi yang digunakan juga berubah dari pola simetris ke pola asimetris. Artinya isi dan bentuk otonomi daerah yang satu dengan yang lainnya dapat berbedabeda. Hal ini nampak dari adanya otonomi khusus bagi Aceh dan Papua. Akibat dari adanya otonomi tersebut adalah terjadi pemekaran wilayah yang salah satunya adalah pemekaran wilayah kecamatan.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah memiliki status keistimewaan melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang Undang nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, persoalan pemekaran wilayah menjadi issue yang sangat menarik, terutama sejak ditetapkannya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerinthan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemekaran wilayah yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi persolan tersendiri karena kondisi dan situasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga saat ini sedang dilanda konflik, rawan terhadap berbagai kemungkinan yang tidak kondusif bagi upaya pemekaran wilayah kecamatan sesuai dengan tujuannya. Bagi masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terutama yang tinggal di pedesaan saat ini sedang mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, sebagai akibat adanya konflik. Akibat konflik yang berkepanjangan tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan mengembangkan potensi dirinya secara mandiri, seperti masyarakat pedesaan lainnya di tanah air.

Harapan masyarakat Aceh terutama di pedesaan adalah adanya

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Effendi, Sofyan, 1989. "Unsur-Unsur Penelitian Survei" dalam : Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (ed), *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. Hal 6-30.
- Effendi, T. Noor dan Chris Manning. 1989. "Teknik Analisa Data" dalam: Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, hal. 163-186.
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1990
- Handayaniingrat, Soewarno, 1993. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: GunungAgung.
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manila, I GK, 1996. *Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework"* dalam *Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.
- Nugroho D, Riant, 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Plume Book.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, 2003. *Aceh Timur Dalam Angka 2003*. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, 2000. *Peraturan daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Sembilan Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur*. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

- Republk Indonesia, 1999. *Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Republk Indonesia, 2000. *Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 Taentang Program Pembangunan Nasuional (PROPENAS) Tahun 2000-2004*. Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Republk Indonesia, 2001. *Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Republk Indonesia, 2001. *Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Sugiyono, 1998. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S.,2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset.
- Wahab, Solichin Abdul, 1990. *Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*, Malang: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,